



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD ZAINI
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 157200

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/300 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, Rp. 600.000.000		
3. Tanah Seluas 874 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	517.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, VESPA MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
3. MOBIL, MITSUBISHI MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
4. MOTOR, MORBIDELLI C252V Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	400.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	83.578.416
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.017.578.416



III. HUTANG

Rp. 440.700.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.576.878.416

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.